



KERANGKA ACUAN KERJA

KEGIATAN

PELAKSANAAN PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA
PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF TINGKAT LANJUTAN

SUB KEGIATAN

MONITORING DAN EVALUASI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
TAHUN 2026

DINAS PARIWISATA

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Komplek Perkantoran Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
Gedung B1 Lt.1 dan Lt.2 Dompok – Tanjungpinang



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PEMERINTAH DAERAH	:	PROVINSI KEPULAUAN RIAU
UNIT ORGANISASI	:	DINAS PARIWISATA
PROGRAM	:	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
KEGIATAN	:	PELAKSANAAN PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF TINGKAT LANJUTAN
SUB KEGIATAN	:	MONITORING DAN EVALUASI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

1. LATAR BELAKANG

A. Dasar hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 23);
8. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 Nomor 6)
9. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan , Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 Nomor 909)
10. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2025 tentang penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 Nomor 1027)
11. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 63 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026 Nomor 1083)
12. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau No 50 Tahun 2022 tentang Pedoman Manajemen Risiko

13. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau No 64 Tahun 2025 tentang perubahan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau no 65 Tahun 2022 tentang pedoman pengelolaan risiko di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
14. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau No 8 Tahun 2025 yang mengatur secara detail mengenai Pedoman Evaluasi Register Risiko

B. Gambaran Umum

Secara geografis, Provinsi Kepulauan Riau berbatasan langsung dengan pusat ekonomi global seperti Singapura dan Malaysia, Kepulauan Riau bukan sekadar untaian pulau di Selat Malaka, melainkan etalase terdepan Indonesia di mata dunia. Posisi strategis ini menempatkan Kepulauan Riau sebagai salah satu destinasi pariwisata utama yang menyumbang kunjungan wisatawan mancanegara terbesar di Indonesia, bersanding ketat dengan Bali dan Jakarta.

Namun, daya tarik Kepulauan Riau tidak lagi hanya bertumpu pada keindahan alam pantai, gugusan pulau eksotis, atau wisata belanja berbasis pelabuhan bebas. Tren global telah bergeser, wisatawan masa kini mencari pengalaman yang otentik, interaksi budaya yang mendalam, dan inovasi yang segar. Di sinilah sektor ekonomi kreatif hadir sebagai motor penggerak baru, melebur bersama pariwisata untuk menciptakan ekosistem "Pariwisata dan Ekonomi Kreatif" yang saling menghidupkan.

Memiliki destinasi sekelas dunia dan produk kreatif yang melimpah tidak akan ada artinya tanpa ditopang oleh satu pilar paling krusial yaitu Sumber Daya Manusia (SDM). Dalam industri jasa dan kreativitas, manusia adalah kreator, penggerak, sekaligus wajah dari industri itu sendiri. Keramahan seorang pemandu wisata, keahlian pelaku kuliner lokal dalam menyajikan hidangan Melayu modern, kreativitas desainer kriya, hingga kemampuan *digital marketer* lokal dalam memasarkan Kepulauan Riau ke kancah internasional semuanya bertumpu pada kualitas SDM.

Tantangannya, Kepulauan Riau menghadapi dinamika yang luar biasa cepat. Perubahan teknologi, pergeseran tren pasar, serta tingginya standar yang dipasang oleh negara tetangga menuntut SDM Parekraf Kepulauan Riau untuk tidak sekadar "bisa bekerja", tetapi harus **unggul, adaptif, dan bersertifikasi kompetensi global**. Pemerintah daerah bersama berbagai instansi terkait sebenarnya telah meluncurkan berbagai program pengembangan SDM, mulai dari pelatihan berbasis

kompetensi, literasi digital, hingga sertifikasi profesi. Namun, pertanyaan besarnya adalah: *Sejauh mana program-program tersebut benar-benar berdampak di lapangan? Apakah investasi besar pada pelatihan tersebut sudah melahirkan SDM yang mampu bersaing, atau justru menciptakan celah baru (gap) dengan kebutuhan industri aktual?*

Di sinilah pentingnya proses Monitoring dan Evaluasi yang komprehensif, sistematis, dan berkelanjutan. Monitoring dan evaluasi bukan sekadar rutinitas administratif di akhir program untuk melihat berapa jumlah peserta yang hadir atau berapa anggaran yang terserap akan tetapi lebih dari itu monitoring dan evaluasi adalah sebuah kompas strategis.

Dalam pelaksanaan kegiatan Monitoring dan Evaluasi pengembangan sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif, manajemen risiko diterapkan sebagai upaya untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan berbagai potensi risiko yang dapat memengaruhi pencapaian tujuan kegiatan. Risiko yang dimaksud meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan, administrasi, sumber daya, maupun faktor eksternal yang dapat menghambat kelancaran kegiatan.

Penerapan manajemen risiko dilakukan sejak tahap persiapan hingga evaluasi kegiatan melalui penyusunan jadwal yang terukur, koordinasi dengan para pemangku kepentingan, verifikasi kesiapan peserta dan pemantauan pelaksanaan kegiatan secara berkala. Apabila ditemukan kendala selama pelaksanaan, akan dilakukan langkah mitigasi secara cepat dan tepat agar kegiatan tetap berjalan sesuai target yang telah ditetapkan.

2. Tujuan Kegiatan

- Menggali realita lapangan secara jujur: Mendengar langsung keluhan kesah, hambatan, dan kisah sukses dari para pelaku pariwisata dan ekraf setelah menerima program pengembangan SDM.
- Melakukan konfirmasi silang (*cross-check*): Menyelaraskan apa yang direncanakan oleh pemerintah dengan apa yang benar-benar dibutuhkan oleh pasar atau industri di Kepulauan Riau saat ini.
- Merumuskan solusi kolektif: Membuka sumbat komunikasi antar-sektor, sehingga evaluasi tidak hanya melahirkan kritik, tetapi langsung menghasilkan rekomendasi taktis dan solutif yang disepakati bersama.
- Melalui pelaksanaan FGD monitoring dan evaluasi yang mendalam dan inklusif ini, Kepulauan Riau diharapkan dapat merumuskan potret utuh mengenai kondisi SDM-nya saat ini. Hasil dari diskusi terarah ini nantinya akan menjadi dasar pijakan utama (rekomendasi kebijakan) yang lebih presisi, efisien, dan



berdampak nyata bagi peningkatan daya saing pariwisata global serta kesejahteraan masyarakat Kepulauan Riau secara berkelanjutan.

3. Sasaran Kegiatan

Sasaran kegiatan ini adalah Pemerintah Daerah bersama Asosiasi Industri Pariwisata (PHRI, ASITA, HPI) dan Pemilik/Pengelola Homestay/Pondok wisata.

4. Bentuk Kegiatan

Mengingat kompleksnya ekosistem Parekraf di Kepulauan Riau yang melibatkan banyak pulau dan sektor, kegiatan monitoring dan evaluasi ini tidak bisa dilakukan hanya dengan melihat angka di atas kertas atau kuesioner kaku. Oleh karena itu, kegiatan Monev ini dirancang dan dilaksanakan dalam bentuk *Focus Group Discussion* (FGD). Pilihan metode FGD ini didasari oleh kebutuhan untuk menciptakan ruang diskusi yang partisipatif, setara, dan mendalam. Melalui FGD, kita mengumpulkan dalam satu meja mulai dari unsur pemerintah (Dinas Pariwisata) dan asosiasi industry pariwisata dan ekonomi kreatif.

5. Waktu dan Tempat Pelaksanaan Kegiatan

TENTATIVE ACARA
MONITORING DAN EVALUASI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

WAKTU	KEGIATAN	KETERANGAN
Hotel Harmoni One, Kota Batam 17 Juni 2026		
18.30 - 19.00	Registrasi	Panitia
19.00 - 20.00	Dinner	Panitia
20.00 - 22.30	Forum Discussion Group	Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau

9. OUTPUT

Output pada kegiatan Monitoring dan Evaluasi ini adalah laporan berbentuk dokumen rangkuman strategis hasil diskusi yang berisi poin – poin penting untuk arah pengembangan SDM pariwisata tingkat lanjutan.



10. Rencana Anggaran Biaya

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH										Formulir RKA-BELANJA SKPD	
Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2026											
Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan											
Urusan Pemerintahan		: 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
Bidang Urusan		: 3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA									
Unit Organisasi		: 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata									
Sub Unit Organisasi		: 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata									
Program		: 3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF									
Kegiatan		: 3.26.05.1.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan									
Sub Kegiatan		: 3.26.05.1.01.0018 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif									
SPM		: -									
Jenis Layanan		: -									
Sumber Pendanaan		: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)									
Lokasi		: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa									
Waktu Pelaksanaan		: Januari s.d Desember									
Kelompok Sasaran		-									
Alokasi 2025		: Rp. 0,00									
Alokasi 2026		: Rp. 22.999.800,00									
Alokasi 2027		: Rp. 0,00									

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Ditingkatkan Kapasitasnya	11,61 %	Capaian Program	Persentase Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Ditingkatkan Kapasitasnya	11,61 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 22.999.800,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 22.999.800,00
Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1 Laporan	Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1 Laporan
Hasil	: -	-	Hasil	: -	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 3.26.05.1.01.0018 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					22.999.800,00					17.007.800,00	-5.992.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					22.999.800,00					17.007.800,00	-5.992.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					22.999.800,00					17.007.800,00	-5.992.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					11.431.800,00					7.431.800,00	-4.000.000,00
5.1.02.01.001	Belanja Barang Pakai Habis					11.431.800,00					7.431.800,00	-4.000.000,00
5.1.02.01.001.00025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					292.000,00					292.000,00	0,00
	[#] Belanja Kertas dan Cover Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					292.000,00					292.000,00	0,00
	[-] Belanja Kertas dan Cover					292.000,00					292.000,00	0,00
	Kertas Hvs Spesifikasi : HVS ukuran A4 70 GR Tanjungpinang	5 Rim	Rim	58.400,00	-	292.000,00	5 Rim	Rim	58.400,00	-	292.000,00	0,00
5.1.02.01.001.00028	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender					295.000,00					295.000,00	0,00
	[#] Belanja Pengadaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					295.000,00					295.000,00	0,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah														
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)		
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)			
5.1.02.01.001.00052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					10.000.000,00					6.000.000,00	-4.000.000,00		
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					10.000.000,00					6.000.000,00	-4.000.000,00		
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan					10.000.000,00					6.000.000,00	-4.000.000,00		
	Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor Spesifikasi : Paket Meeting Room dengan satu kali makan dan 1 kali snack di hotel bintang tiga atau di bawahnya	50 Orang / Kali	Orang / Kali	200.000,00	-	10.000.000,00	30 Orang / Kali	Orang / Kali	200.000,00	-	6.000.000,00	-4.000.000,00		
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					11.568.000,00					9.576.000,00	-1.992.000,00		
5.1.02.04.001	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					11.568.000,00					9.576.000,00	-1.992.000,00		
5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					11.568.000,00					9.576.000,00	-1.992.000,00		
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					11.568.000,00					9.576.000,00	-1.992.000,00		
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Biasa					11.568.000,00					9.576.000,00	-1.992.000,00		
	Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri Pejabat Eselon IV/Golongan III/Golongan II/Golongan I/PPPK/Non ASN Spesifikasi : Kepulauan Riau	4 Orang / Hari	Orang / Hari	792.000,00	-	3.168.000,00	3 Orang / Hari	Orang / Hari	792.000,00	-	2.376.000,00	-792.000,00		
	Satuan Biaya Transportasi Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pergi Pulang (PP) Spesifikasi : Tanjungpinang-Batam	7 Orang / pp	Orang / pp	460.000,00	-	3.220.000,00	6 Orang / pp	Orang / pp	460.000,00	-	2.760.000,00	-460.000,00		
	Uang harian perjalanan dinas dalam negeri luar kota Spesifikasi : Kepulauan Riau	14 Orang / Hari	Orang / Hari	370.000,00	-	5.180.000,00	12 Orang / Hari	Orang / Hari	370.000,00	-	4.440.000,00	-740.000,00		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :						22.999.800,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :					17.007.800,00	-5.992.000,00	
							Provinsi Kepulauan Riau..... Kepala Dinas Pariwisata							
							HASAN, S.Sos NIP. 197711102006041010							

11. Penutup

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pengembangan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melalui Focus Group Discussion (FGD) bersama asosiasi pariwisata dan pengelola homestay di Kota Batam diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kondisi, perkembangan, serta kebutuhan pengembangan kompetensi SDM di lapangan. Kegiatan ini juga menjadi wadah untuk memperoleh masukan langsung dari para pelaku dan pemangku kepentingan terkait sebagai bahan evaluasi terhadap program yang telah dilaksanakan serta penyusunan langkah tindak lanjut yang lebih tepat sasaran.

Dengan terlaksananya kegiatan ini, diharapkan terbangun koordinasi dan sinergi yang lebih baik antara pemerintah daerah, asosiasi, pengelola homestay, serta pemangku kepentingan lainnya dalam mewujudkan SDM pariwisata dan ekonomi kreatif yang kompeten, profesional, dan mampu menjawab kebutuhan perkembangan industri pariwisata saat ini dan yang akan datang..

**KEPALA DINAS PARIWISATA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
PENGGUNA ANGGARAN**



HASAN, S.Sos.,
Pembina Utama Muda
NIP. 19771110 200604 1 010